

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses UMKM pada pembiayaan adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan lewat lembaga keuangan dengan skema penjaminan. Program KUR bertujuan untuk meningkatkan kapasitas permodalan usaha sekaligus menerapkan kebijakan yang dapat mempercepat perkembangan sektor riil dan meningkatkan pemberdayaan UMKM. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 perihal Kebijakan Percepatan Pembangunan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Pembiayaan yang menyalurkan KUR bersumber dari dana perbankan atau lembaga keuangan. Dana itu disalurkan baik pada badan usaha, kelompok usaha, dan/atau pelaku UMKM perseorangan yang menjalankan usaha dengan produktif dan layak. Bentuknya berupa modal kerja dan dana investasi.¹ Dalam hal ini pemerintah berkerja sama dengan beberapa bank, termasuk bank syariah yaitu seperti BRI Syariah, BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Bank Rakyat Indonesia Syariah adalah salah satu bank syariah yang menyalurkan program prioritas pemerintah untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam menjalankan produknya BRI Syariah memberikan nama Bisnis Mikro. Pembiayaan modal kerja dan investasi hingga Rp 200 Juta ditawarkan sebagai solusi usaha mikro baik bagi perorangan ataupun kelompok. Mikro Faedah iB dan KUR iB menjadi dua pilihan pembiayaan yang termasuk dalam produk ini. Produk Mikro Faedah iB menawarkan skema tanpa dan dengan agunan, agunan berupa sertifikat tanah, kendaraan, dan aset lainnya. Mikro Faedah iB merupakan produk pembiayaan yang mencakup skema Murabahah, Ijarah Mutahiyah Bitamlik (IMBT), dan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dengan total pelunasan seluruh pembiayaan produk mikro maksimal Rp 200 Juta per nasabah. Di lain sisi, KUR iB merupakan pembiayaan modal kerja dan/atau investasi bagi debitur yang layak dan produktif namun tidak memiliki cukup agunan. Pembiayaan KUR iB dikategorikan menjadi dua yaitu KUR Mikro dengan plafon Rp 25 Juta dan KUR Kecil dengan plafon maksimal Rp 200 Juta. Pada tahun 2020, pembiayaan mikro BRI Syariah senilai Rp 10,34

¹ 'Maksud Dan Tujuan Kredit Usaha Rakyat', *Keuangan, Kementerian* <<https://kur.ekon.go.id/maksud-dan-tujuan>> (Diakses pada 27 Desember 2022).

Triliun, meningkat besar 157,94% dibanding 2019 yang senilai Rp 4,01 Triliun.² Dengan begitu pembiayaan mikro di BRI Syariah memperlihatkan nilai positif dari tahun lalu.

Bank syariah yang konsentrasi mengembangkan sektor mikro adalah Bank Negara Indonesia Syariah. Sesuai dengan nilai pembiayaan yang dituju, jangka waktu yang dipersyaratkan, dan prinsip syariah, pembiayaan mikro BNI Syariah merupakan pembiayaan produktif yang memiliki cakupan cukup luas sehingga dapat memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Lima produk keuangan mikro BNI Syariah, yakni BNI Micro 2 iB Hasanah yang memiliki plafon pembiayaan antara Rp 5 hingga 50 Juta, BNI Micro 3 iB Hasanah yang memiliki plafon pembiayaan antara Rp 50 hingga 500 Juta, BNI Wirausaha (WUS) iB Hasanah yang memiliki plafon pembiayaan antara Rp 50 hingga 1 Miliar; BNI KUR Mikro iB Hasanah yang memiliki plafon pembiayaan antara Rp10 hingga Rp 50 Juta; dan BNI KUR Kecil iB Hasanah yang memiliki plafon pembiayaan antara Rp 50 Juta hingga Rp500 Juta. Pembiayaan Mikro BNI Syariah di tahun 2020 tetap mengalami pertumbuhan yaitu sebesar Rp 1,802 Miliar meningkat sebesar 43,50% dibanding tahun 2019 sebesar Rp 1,594 Miliar.³ Sehubungan dengan hal itu BNI Syariah mencatatkan nilai positif dalam pembiayaan mikro ditahun 2020 dibanding tahun lalu.

Bank Mandiri Syariah berdedikasi untuk memfasilitasi dukungan keuangan bagi usaha kecil dalam upaya mendorong ekspansi perekonomian di sektor riil dan membantu inisiatif pemerintah dalam perolehan tenaga kerja. Layanan itu dikenal dengan nama Warung Mikro. Segmentasi khusus Bank Mandiri Syariah yang dikenal dengan nama Warung Mikro Bank Mandiri Syariah bertanggung jawab mengelola pendanaan hingga Rp 200 Juta untuk pedagang atau kontraktor independen. Tujuan dari keuangan mikro ini adalah untuk membantu pedagang kecil dan menengah dalam hal permodalan.⁴ Di tahun 2020 pembiayaan mikro di Bank Mandiri Syariah mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 2,87 Triliun dari pada tahun 2019 yaitu sebesar 3,80 Triliun.⁵ Sehubungan dengan hal itu Bank Mandiri

² 'Laporan Tahunan Bank BRI Syariah 2020', *Bankbsi.Com*, 2020, 9-103 <<https://ir.bankbsi.co.id/misc/AR-BRIS-2020.pdf>>.

³ BNI Syariah, *Laporan Tahunan BNI Syariah 2020, Annual Report*, 2020, DLXXIV.

⁴ Bakhtiyar Arifin and Warsidi Warsidi, 'Implementasi Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro)', *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2020) <<https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6864>>.

⁵ 'Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri 2020', *www.bankbsi.com*, 2020, 1-182.

Syariah mengalami penurunan di tahun 2020 berbeda dengan dua bank syariah diatas yang mengalami kenaikan dalam produk pembiayaan mikro yang dimiliki.

Kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) pada 1 Februari 2021 menorehkan sejarah perbankan syariah. BSI merupakan hasil gabungan tiga bank syariah: BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri (BSM). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan persetujuan merger pada 27 Januari 2021 melalui Surat Nomor SR-3/PB.1/2021. BSI merupakan ikhtiar membangun bank syariah kebanggaan masyarakat yang diharapkan mampu memberikan dorongan baru bagi pembangunan perekonomian nasional dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas. Kemunculan Bank Syariah Indonesia juga memperlihatkan wajah baru perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberi kebaikan bagi seluruh alam (*Rahmatan Lil Aalamiin*).⁶

Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Pati merupakan satu dari sekian lembaga keuangan di Kabupaten Pati yang menyalurkan KUR Mikro Syariah. Kehadiran UMKM sangat penting bagi perkembangan perekonomian Kota Pati, sebab UMKM menjadi penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di kota Pati. Jumlah usaha mikro, kecil dan menengah di kota Pati sendiri tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, sampai saat ini UMKM berjumlah sebesar 1827 per tahun 2022.⁷

Keterbatasan atau kekurangan modal merupakan problematika yang tidak bisa dilepaskan dari pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebab problematika kekurangan modal, membuat usaha mikro, kecil, dan menengah sering kali menghadapi tantangan dan kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Kurangnya pengetahuan perihal kredit dan pembiayaan, serta lokasi bank yang terlalu jauh bagi kebanyakan usaha mikro kecil dan menengah yang tinggal di pedesaan, mungkin menjadi salah satu faktor problematika ini. Problematika berikutnya yang dialami sebagian dari pengusaha atau usaha tidak memakai layanan perbankan, yaitu dengan alasan berikut:⁸

1. Tidak tahu prosedur, kurangnya pemahaman perihal tata cara pememinjam uang di bank.

⁶ 'Sejarah Perseroan BSI', *Bank Syariah Indonesia*, www.ir-bankbsi.com, 2021, 20–21.

⁷ 'Data UMKM Per Kab/Kota' <<https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/data/umkm-kabkota>> (Diakses pada 25 September 2023).

⁸ 'Usaha Mikro Kecil Dan Menengah' <<https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html>> (Diakses pada 25 Desember 2023).

2. Prosedur Sulit, Masyarakat menganggap proses, sistem, atau prosedur yang terkait dengan peminjaman bank sulit atau berbelit-belit.
3. Tidak ada agunan, tidak memunyai agunan atau jaminan berupa sertifikat mobil, sertifikat rumah, atau harta benda lainnya sebagai salah satu syarat meminjam di bank
4. Suku bunga yang tinggi, terlebih untuk pinjaman bank
5. Tidak minat, tidak ada keinginan untuk mengajukan pinjaman bank.
6. Saat mengajukan proposal pinjaman, proposal tersebut ditolak, dan pihak bank memutuskan untuk tidak menyetujui pinjaman itu.

Aspek pendukung dalam meningkatkan output dan kinerja adalah modal. Saat dihadapkan pada kendala pendanaan, pengusaha mikro terkadang beralih ke rentenir untuk mencari solusi sementara, yang akhirnya menjebak mereka. Dengan bunga yang tinggi, menunggak pembiayaan maka akan menambah bunga semakin banyak sehingga bisa menyebabkan pada usahanya yang mengalami penurunan. Dalam hal ini pemerintah melakukan upaya atau program untuk mengatasi problematika itu dengan mengadakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) selaras dengan penjelasan diawal perihal pembiayaan itu. BSI KC Pati memberi nama BSI KUR Mikro. BSI KUR Mikro sendiri terbagi menjadi dua jenis produk pembiayaan yaitu Mikro Usaha atau Mikro Reguler dengan fasilitas hingga Rp 200 Juta dan BSI KUR yang terdiri menjadi tiga yaitu BSI KUR Super Mikro dengan fasilitas pembiayaan diatas RP 1 Juta hingga Rp 10 Juta, BSI KUR Mikro dengan fasilitas pembiayaan diatas Rp 10 Juta hingga Rp 100 Juta, dan yang terakhir BSI KUR Kecil dengan fasilitas pembiayaan diatas Rp 100 Juta hingga Rp 500 Juta.⁹ Namun, fenomenan yang di temukan dikalangan UMKM ialah ketidak tauan akan bank syariah, kurangnya pengetahuan perihal bank syariah sehingga banyak yang beranggapan bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional. Tidak hanya itu para usaha mikro juga tidak tahu prosedur dalam pengajuan pembiayaan, kurangnya pengetahuan perihal prosedur dalam pengajuan pembiayaan membuat para pelaku UMKM mengurungkan niat untuk pengajuan pembiayaan di bank itu.

⁹ 'Produk BSI KUR Mikro', *Bankbsi.Com*, 2021 <<https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/bsi-kur-super-mikro>> (Diakses pada 20 Januari 2023).

Ada juga penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Abdul Wahid Mongkiti, Trisno Wardy Putra, dll (2021) menuturkan bahwa problematika dalam penyaluran pembiayaan KUR Mikro Syariah yaitu calon nasabah yang mainsetnya perihal bank syariah disamakan dengan bank konvensional, dan calon nasabah memiliki fasilitas pembiayaan di bank lain.¹⁰ Kedua, penelitian dari Irma Rahmawani Panjaitan, Khairina Tambunan (2022) menuturkan bahwa ada hambatan dalam penyaluran KUR Mikro Syariah diantaranya calon nasabah banyak yang mengeluh sebab agunan, yang harus memiliki sertifikat di lain sisi di daerah Perbaungan calon nasabah masih memakai SK Camat, dan lain sebagainya.¹¹ Ketiga, penelitian dari Dita Mylinda Agustin, Widita Kurniasari (2022) menuturkan bahwa peran dari pembiayaan BSI KUR Mikro adalah sebagai perantara untuk membantu pelaku UMKM dengan cara memberikan modal usaha dengan penerapan yang tidak memberatkan pihak UMKM, sehingga secara garis besar bawasannya pembiayaan KUR Mikro di BSI Lamongan Wahidin sudah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di kota Lamongan.¹² Keempat, penelitian dari Nurhaliza, Ahmad Sanusi Lukman, dll (2022) menuturkan bahwa implementasi produk BSI KUR Syariah pada PT. BSI KCP Binjai Sudirman berjalan dengan memakai akad Murabahah dan akad Murabahah bil wakalah. Dalam prosedur pembiayaan KUR Syariah di bank ini, yakni proses penerapan 5C pada alur pembiayaan KUR.¹³ Kelima, penelitian dari Muhammad Ali (2022) menuturkan bahwa prosedur analisis kelayakan pembiayaan yang diajukan calon nasabah memiliki tujuh tahapan yaitu

¹⁰ Abdul Wahid Mongkiti and others, 'Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro', *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1.1 (2021), 91 <<https://doi.org/10.31332/robust.v1i1.2886>>.

¹¹ Irma Rahmawati Panjaitan and Khairina Tambunan, 'Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Di BSI KCP Perbaungan', *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2.1 (2022), 923–26.

¹² Dita Mylinda Agustina and Widita Kurniasari, 'Peranan Pembiayaan Bsi Kur Mikro Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus Bsi Lamongan Wahidin)', *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 3.3 (2022), 228–34 <<https://doi.org/10.21107/bep.v3i3.16092>>.

¹³ S W Nurhaliza N, Lukman A S, Hasibuan, 'Implementasi Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Binjai Sudirman', *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 04.01 (2022), 70–83.

permohonan pembiayaan, BI checking, survey, analisis pembiayaan, akad, pembuatan rekening, dan penyairan.¹⁴

Peneliti memilih lokasi penelitian disalah satu bank syariah yang ada dikabupaten Pati yakni BSI KC Pati Sudirman, tepatnya di jalan Pati Sudirman No. 207, Plaza Pati, Pati kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. BSI KC Pati Sudirman ialah entitas baru dari adanya merger dari pusat terdahulu yaitu Bank Mandiri Syariah, bank ini sudah berdiri kurang lebih 11 tahun dan pada tanggal 1 Februari 2021 berubah nama menjadi BSI KC Pati Sudirman. Di BSI KC Pati Sudirman memiliki program pembiayaan, yang tentunya sangat mendukung dan mendorong akan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Program pembiayaan ini di realisasikan dengan skema yang diterapkan, dengan memakai produk yang disebut BSI KUR Mikro, yang merupakan pembiayaan khusus untuk pemilik usaha mikro kecil dan menengah. Pembiayaan KUR Mikro BSI ini merupakan pembiayaan yang produktif, dengan memberikan dana berupa modal kerja atau investasi untuk memenuhi kebutuhan proses produksi untuk pengembangan usaha mikro di Kabupaten Pati.

Berlandaskan pemaparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian perihal pembiayaan KUR Mikro Syariah di Bank Syariah Indonesia terkhusus di BSI KC Pati Sudirman. sehubungan dengan hal itu penulis mengambil penelitian dengan judul **“Implementasi Produk Pembiayaan Mikro Syariah pada Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di BSI KC Pati.”**

B. Fokus Penelitian

Berlandaskan latar belakang diatas, penulis menfokus penelitian perihal implementasi produk pembiayaan kredit usaha rakyat mikro syariah pada BSI KC Pati.

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masaalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk prosedur prmbiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KC Pati?

¹⁴ Muhammad Ali and Ricci Rosinta, 'PROSEDUR ANALISIS KELAYAKAN PADA PEMBIAYAAN KUR MIKRO SYARIAH (STUDI KASUS PADA BSI KCP SUDIRMAN INDRAMAYU)', *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 1.2 (2022), 130–37.

2. Bagaimana implementasi produk pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Pati?
3. Apa kendala yang dialami dalam penyaluran produk pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Pati?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam studi yang ingin dicapai oleh penulis yaitu, yakni:

1. Untuk mengetahui bentuk pembiayaan KUR Mikro Syariah di BSI KC Pati?
2. Untuk mengetahui implementasi produk pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Pati.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam penyaluran produk pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Pati.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki banyak manfaat baik teoritis ataupun praktis

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan bisa dipakai untuk sarana penambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan perihal ekonomi dan perbankan, terlebih pada bidang pembiayaan KUR Mikro Syariah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi UMKM
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi pada UMKM ataupun masyarakat luas perihal implementasi produk pembiayaan KUR Mikro Syariah pada BSI KC Pati serta bisa meningkatkan kinerja para pelaku UMKM dan memperlihatkan seberapa pengaruh yang diberikan perbankan syariah dalam upaya meningkatkan UMKM.
 - b. Bagi Akademisi
Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan baik secara teoritis ataupun praktis perihal pembiayaan KUR Mikro Syariah dan UMKM.
 - c. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan bisa memperluas wawasan dan pengalaman serta memberikan informasi bagi para pelaku UMKM pada lakah nyata perbankan syariah untuk mendorong kegiatan UMKM.

F. Sistematika Penelitian

Dalam studi ini sistematika yang dimaksud yaitu penempatan unsur problematika dan urutannya sehingga bisa menjadi satu kesatuan kerangka ilmiah yang tersusun dengan rapi nan logis, sistematika disusun, yakni:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi gambaran umum dari problematika yang akan dibahas. Dalam pendahuluan ini memuat latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II: KERANGKA TEORI

Dalam bab ini berisi kerangka teori yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini merupakan pemaparan perihal metode penelitian yang memuat jenis data pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab terakhir ini berisi perihal kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang sudah diteliti dan di analisis sehingga bisa ditarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA